

**TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA
(Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

IRAWAN ADI WIJAYA

C 100.090.114

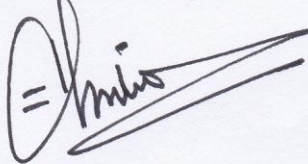
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

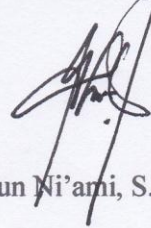
Mengetahui

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Irawan Adi Wijaya

NIM : C. 100.090.114

Fakultas : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN

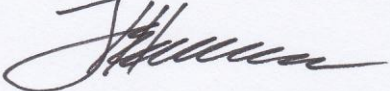
HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA (Studi pada
Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk;

- Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
- Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
- Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 Oktober 2013



Irawan Adi Wijaya

ABSTRAK

Irawan Adi Wijaya, NIM : C.100.090.114, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013, Judul : “TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA”

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum. Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang harus didasari dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang, mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim (audi et alterampartem), dan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan (acces to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama dalam mendapatkan akses keadilan.

Penerapan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, melalui Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum membuka peluang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat miskin dan/atau termarginalkan untuk mendapatkan pendampingan hukum secara profesional untuk membela hak-haknya, seperti halnya pada orang yang mampu. Bantuan Hukum diberikan secara gratis sebagai kewajiban Negara dan pengabdian Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum untuk mengawal tercapainya keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

Kata kunci: Keadilan, Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹ Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis, dan tidak diartikan secara statis. Artinya kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai, akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.²

Dengan permasalahan dan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian **TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA (Studi pada Lembaga pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)**

¹ A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK, Hlm. 34.

²A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK, Hlm 47.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu -Bagaimana kesesuaian peran Lembaga Bantuan Hukum dengan regulasi dalam proses penanganan kasus hukum perdata? -Bagaimana proses penanganan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus hukum perdata?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam proses penanganan kasus hukum perdata bagi penerima bantuan hukum sesuai dengan regulasi yang berkaitan, untuk mengetahui proses penanganan kasus dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus hukum perdata.

Metode Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dan empiris yaitu, Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.³ Dan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, yang mengamati bagaimana proses yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁴

Dengan metode penelitian yang dilakukan dengan studi normatif dan empiris yaitu dengan tinjauan pustaka dan studi lapangan maka dapat diketahui bagaimana penyelesaian kasus hukum perdata dan pelayanannya pada Lembaga Bantuan

³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 34.

⁴*Ibid.* Hlm. 47.

Hukum. Dalam penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁵ Dengan hal ini penulis akan memaparkan apakah pada Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Surakarta telah melangsungkan program Bantuan hukum dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

Metode analisis data.

Metode penelitian yaitu menggunakan deskriptif-analisis.⁶ yaitu dengan mendiskripsikan mengenai hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisa dengan deskriptif-analisis yang dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan peraturan-peraturan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan.

PEMBAHASAN

Peran dan Kesesuaian Lembaga Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penanganan kasus hukum perdata.

Peran LBH YAPHI dan LBH Mega Bintang pada landasan konstitusional terdapat kesesuaian dengan amanat perundang-undangan yaitu dapat dilihat dari visi misi kelembagaannya. Pelayanan Bantuan Hukum yang diterapkan yaitu sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi LPH YAPHI. Lembaga Pengabdian Hukum ini juga sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang berperan memberikan bantuan hukum kepada pencari bantuan hukum seperti pengertian Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 1 ayat (1) yaitu “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Pembahasan disini adalah tentang “Penerima Bantuan Hukum” siapa sajakah yang dapat menerima bantuan hukum. Dalam Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum

⁵Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 25.

⁶Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: U.B Press, Hlm 15.

adalah orang atau sekelompok orang miskin”. Kemudian bagaimana dengan orang yang termarjinalkan, orang-orang yang terlantar, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, ataupun dengan anak-anak jalanan. Undang-Undang Bantuan Hukum hanya memberikan bantuan hukum terhadap golongan orang miskin saja kurang menjelaskan secara detail mengenai penerima Bantuan Hukum, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 14 ayat (1), yaitu. “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat” : Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan Dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Sedangkan pada LBH Mega Bintang yang sifatnya konvensional umumnya menerima klien dari kalangan perorangan ataupun kelompok yang tidak mampu, pada visi, misi dan tujuan LBH Mega Bintang. Dengan landasan organisasi tersebut LBH Mega Bintang mempunyai kesesuaian terhadap amanat konstitusional. Maka klien yang tidak mampu dapat mengajukan persyaratan keterangan miskin dari kelurahan atau pejabat setempat untuk mendapat bantuan hukum. Tetapi pada masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal dapat diberi bantuan dengan syarat pemohon bantuan hukum yang tidak memiliki identitas dan tempat tinggal, dapat terlayani dengan cara pemberi bantuan hukum membantu untuk mencari surat keterangan alamat sementara atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang dan harus diketahui oleh lurah/kepala desa domisili tempat pemberi bantuan hukum/Lembaga Bantuan Hukum. ⁷

⁷ Ali Fachrudin S.H. Direktur LBH Mega Bintang. *Wawancara Pribadi*. Surakarta. 22 Juli 2013. Pukul 11.30 WIB.

Tentang Pemberi Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum No. 16 tahun 2011, pasal 9 huruf a Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dengan perannya masing-masing, dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan atau pendampingan dari advokat yang dapat dicantumkan dalam surat kuasa. Dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4), "bahwa tidak hanya Advokat saja yang boleh beracara dipengadilan, tetapi Mahasiswa Fakultas hukum, Dosen dan Paralegal dapat beracara di Pengadilan sehingga dapat melatih mahasiswa dan paralegal dalam membantu peran LBH. Pada LBH YAPHI dan LBH Mega Bintang hanya terdapat Advokat dan Paralegal, Peran paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum cukuplah penting, paralegal membantu penerima bantuan hukum dalam proses penanganan kasus, khususnya pada kasus hukum perdata paralegal berperan mendampingi klien, investigasi kasus, memberikan pengarah hukum, melakukan mediasi dan perdamaian, mengadvokasi kepentingan masyarakat yang terkena kasus hukum struktural. Paralegal diangkat oleh LBH dengan salah satu syaratnya adalah memahami hukum dan pernah mengikuti pelatihan paralegal. Pada Lembaga Bantuan Hukum juga yang terpenting adalah peran advokat karena advokatlah yang berkompeten dan diakui telah berpengalaman menangani persoalan hukum jadi pada Advokat yang berada dalam Kelembagaan Bantuan Hukum juga telah melakukan amanahnya dalam UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kasus hukum yang ditangani pada LBH YAPHI dan LBH Mega Bintang tidak semua diterima, khususnya bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kecil, termarginalkan dan kurang mampu, pada LBH YAPHI

khususnya menangani kasus hukum struktural pada kasus hukum perdata yaitu kasus struktural hukum Agraria yang banyak melibatkan kepentingan para anggota masyarakat yang berlawanan dengan kepentingan Negara, dimana LBH YAPHI memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum yang bertujuan agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi. untuk kasus-kasus hukum perdata yang sifatnya privat LBH YAPHI berperan membantu dalam segi konsultasi dan pemberian bantuan hukum secara administrasi.

Kemudian penanganan kasus hukum yang ditolak oleh LBH Mega Bintang adalah kasus-kasus hukum yang sifatnya *extra ordinary crime*, seperti korupsi, kasus narkoba dan korupsi. Penolakan kasus hukum dilakukan karena berbeda dengan Visi Misi LBH.⁸ Seperti yang tertuang dalam penjelasan panduan Implementasi Bantuan Hukum yaitu kasus hukum dapat ditolak karena beberapa hal yaitu : Pemberian Bantuan Hukum memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum dalam jangka paling lama tiga hari sejak tanggal permohonan diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum, keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus berdasarkan alasan yaitu tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum, persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi, dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.⁹

Mengenai Verifikasi dan Akreditasi yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM,

⁸ Budhi Kuswanto, S.H. Pengacara LBH Mega Bintang. *Wawancara Pribadi*. Surakarta. 15 Juli 2013. Pukul 11.30 WIB.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Bantuan Hukum Kemnukumham RI. Hlm 46.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Kemasyarakatan. Sedangkan Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. LPH YAPHI menolak verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam persyaratan LBH dalam UU Bantuan Hukum Pasal 8 ayat (1) dan (2) yaitu : Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang ini. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki Program bantuan Hukum. LPH YAPHI telah memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum tetapi mengenai ketentuan verifikasi dan akreditasi yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 7 ayat (1) b yaitu " Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini". Namun LPH YAPHI menolak verifikasi dan akreditasi tersebut dikarenakan sifat LPH YAPHI yang mandiri, dan juga tujuannya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang hukum dikhawatirkan apabila menerima bantuan dari pemerintah tidak bisa mandiri dan bebas memberikan kritik dan pengawasan hukum lagi.

LBH Mega Bintang telah tercatat dan mendapat akreditasi C, pengakreditasian ditentukan oleh syarat-syarat yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM. LBH Mega Bintang melakukan pemberian bantuan hukum

dilandaskan pada peraturan dan syarat-syarat sesuai standarisasi Undang-Undang Bantuan hukum sehingga terikat pada Peraturan perundang-undangan, dengan Standar bantuan hukum yang meliputi: Standar Bantuan Hukum litigasi. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukujm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar untuk penanganan kasus hukum perdata : wajib memberikan upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Standar Bantuan Hukum Non litigasi: Bantuan hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum, bantuan hukum nonlitigasi berupa; penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negoisasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan drafting dokumen hukum.¹⁰

Standar Pemberian Bantuan Hukum Permohonan. Bantuan Hukum dapat diajukan secara tertulis oleh calon penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Permohonan bantuan hukum paling sedikit memuat ; Identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus disampaikan oleh calon Penerima Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Organisasi Pemberi Bantuan Hukum pada hari kerja dan jam kerjanya, dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak dapat datang langsung kekantor Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak

¹⁰ *Ibid. Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.* Hlm 31.

lain dengan melampirkan surat kuasa.¹¹ Dokumen lampiran Permohonan Bantuan Hukum: Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud, harus melampirkan fotokopi KTP atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau dapat melampirkan surat keterangan lainnya seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.¹²

Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum. Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi, besaran anggaran Bantuan Hukum ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Syarat dokumen bantuan hukum litigasi dalam penanganan kasus hukum perdata adalah bukti penanganan perkara yang sesuai dengan tahapan pemeriksaan yaitu berupa; surat kuasa, pendapat hukum (*legal opinion*), somasi, gugatan atau jawaban gugatan, tawaran mediasi atau jawaban, eksepsi atau replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, dan/atau memori peninjauan kembali. Untuk syarat bantuan hukum nonlitigasi dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud untuk Bantuan Hukum nonlitigasi meliputi: Surat kuasa, pendapat hukum (*legal opinion*), pelaporan atau pengaduan, somasi atau teguran, surat hearing atau audiensi, tawaran mediasi dan akta perdamaian.

Standar pelaporan pengelolaan anggaran. Pemberi Bantuan Hukum

¹¹ *Ibid.* Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal 45.

¹² Oleh Dr. Wicipto Setiadi. Kepala Badan pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. Disampaikan pada Rakernas Bantuan Hukum. Di Hotel Sultan Jakarta. 27 Juli 2013.

menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum kepada Menteri melalui Kepala Pembinaan Hukum Nasional secara triwulan, semesteran, dan tahunan. Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud merupakan bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pengelolaan Bantuan Hukum, yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya yang sah. Laporan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum, laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum, laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum, dan catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum yang telah telah terverifikasi dan terakreditasi dan orang yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum mendapat sanksi pidana dan ganti rugi apabila terbukti menyalahi tugasnya yang tercantum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 20 "Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum." dan Ancaman pidana Pasal 21 yaitu "Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pelanggaran dalam Pemberian Bantuan Hukum dapat berupa penelantaran kasus yang ditangani, pemberi bantuan hukum menolak kasus tanpa ada dasar-dasar penolakan yang jelas, pemberi bantuan hukum meminta pembayaran terhadap klien, menjanjikan kemenangan kasus yang ditangani, dan terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang terkait perannya sebagai pemberi bantuan hukum. Dalam kontrak perjanjian kerja dengan pemerintah apabila

ditemukan pelanggaran Pemberian Bantuan Hukum. Menteri dapat membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum, menghentikan pemberian dana dan tidak memberikan anggaran dana kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Proses penanganan kasus hukum perdata dan kendala pemberian bantuan hukum pada LBH

Pada LPH YAPHI dan LBH Mega Bintang mengenai penanganan perkara perdata dalam kasusnya telah didampingi Advokat dan diberikan layanan bantuan hukum berupa nonlitigasi dan litigasi. LPH YAPHI penanganan klien kasus hukum perdata dilayani pada hari itu juga saat klien datang, klien harus memberikan data diri dan data kasus untuk menceritakan kronologi kasusnya kepada pemberi bantuan hukum. Kemudian pelayanan pertama adalah konsultasi, apabila klien tersebut buta hukum atau kurang paham dengan kasus yang dihadapinya pengacara yang terdapat disitu memberikan pengarahan dan solusi terhadap kasusnya sampai klien paham terhadap permasalahan yang dihadapinya, apabila perkara tersebut sampai pada peradilan maka LPH YAPHI memberikan bantuan administrasi dengan membuat dan menyusun surat-surat yang diperlukan klien untuk maju sendiri dalam proses peradilan (*litigasi*) dapat mengajukan *prodeo* dengan tetap diberikan pendampingan melalui belakang sampai kasus tersebut selesai dan mempunyai ketetapan hukum/inkrah. Diharapkan klien dapat mandiri dan lebih paham mengenai kasusnya, sehingga nantinya klien tersebut dapat menyelesaikan kasus yang sama secara mandiri dan lebih paham hukum. Dalam mengajukan *prodeo* LBH YAPHI meminta keterangan tidak mampu atau keterangan miskin (SKTM) dari kelurahan/desa untuk dilampirkan dalam berkas perkara untuk dimohonkan ke Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya klien dibuatkan surat permohonan untuk berperkara secara *prodeo* dengan mencantumkan alasan-alasannya. Selanjutnya setelah ada

penetapan ijin secara *prodeo* dari Pengadilan Negeri maka proses persidangan dapat dilaksanakan.

Penanganan kasus pada LBH Mega Bintang juga diberikan dalam layanan bantuan hukum nonlitigasi dan litigasi. Klien yang datang diterima dan dikelompokkan apakah kasus tersebut diterima atau ditolak/direkomendasikan ke kantor pengacara apabila tidak memenuhi kriteria penerima bantuan hukum. Kemudian klien harus membawa data diri dan menceritakan kronologi kasusnya setelah itu Pengacara pada LBH Mega Bintang memberikan pemahaman terhadap posisi kasusnya apabila data dirasa cukup maka klien ditawarkan untuk memberikan kuasa hukumnya kepada pemberi bantuan hukum untuk ditangani apabila dalam kasus nonlitigasi kasus hukum perdata tetap dilakukan dengan upaya damai yaitu dengan mediasi, atau audiensi apabila kasus tersebut tidak dapat terselesaikan maka kasus hukum perdata tersebut akan diteruskan ke *litigasi* yang sebelumnya diberikan surat somasi atau surat teguran kepada pihak lawan, surat somasi ini juga merupakan surat peringatan untuk menggertak lawan agar pihak lawan dapat diajak untuk melakukan penyelesaian secara damai, dan diteruskan oleh pemberi bantuan hukum sampai kasusnya terselesaikan atau mendapat ketetapan hukum. Untuk pengajuan penanganan *prodeo* ke Pengadilan Negeri klien cukup diminta untuk melengkapi persyaratan yaitu fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat keterangan tidak mampu untuk dimohonkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk ijin penanganan hukum secara *prodeo*, selama ini LBH Mega Bintang tidak ada masalah dengan pengajuan perkara secara *prodeo*, setiap kasus yang sifatnya Bantuan Hukum maka LBH Mega Bintang tidak pernah mendapat penolakan dalam pengajuan *prodeo*.

Pada pelayanan Lembaga Bantuan Hukum pada prinsipnya bukan mencari profit karena berbeda dengan pelayanan dikantor advokat pada umumnya yang

pembelaannya secara subyektif karena mencari keuntungan dan kepercayaan dari klien tetapi berbeda dengan pelayanan di LBH penanganan kasus hukum tidak boleh terlalu subyektif tetapi harus obyektif, bukan kepentingan orangnya yang kita bela namun kedudukan hukumnya yang harus kita luruskan dan kita dampingi, kalau bukan karena terlalu subyektif biasanya hanyalah proses komunikasi antara klien yang bermasalah.¹³

Proses penyelesaian kasus hukum perdata pada LBH YAPHI maupun Mega Bintang pada umumnya menangani kasus tentang, tenaga kerja, hutang piutang, perceraian, dan agraria. Dalam kasus penanganan dan penyelesaian kasus hukum perdata agraria pada kasus pertanahan dapat terjadi dikarenakan beberapa macam antara lain karena masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kasus hukum perdata pada umumnya adalah pada faktor sosialisasi bantuan hukum dimana kebanyakan masyarakat apabila mendapati kasus hukum mengetahuinya adalah ke kantor Advokat/Pengacara kurang mengetahui adanya lembaga sosial atau organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma bahkan gratis untuk golongan masyarakat kecil dan miskin, kemudian mengenai kurang pahamiannya masyarakat mengenai hukum, dan klien yang datang untuk mendapatkan bantuan hukum kurang memberikan kewajibannya untuk terusterang terhadap kasus yang dialaminya dikarenakan takut, dan khawatir. Pada LBH YAPHI maupun LBH Mega Bintang selama memberikan pelayanan Bantuan Hukum tidak pernah melakukan pembiaran terhadap kasus yang ditanganinya, karena pemberian Bantuan Hukum dilakukan dengan maksimal dan profesional

¹³ Ali Fachrudin, S.H. Direktur LBH Mega Bintang. *Wawancara Pribadi*. Surakarta. 17 Juli 2013. Pukul 14.30 WIB.

sehingga belum pernah mengalami teguran atau pernyataan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

Kendala Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya tergantung terhadap masing-masing LBHnya sendiri, untuk LPH YAPHI untuk kendala dalam menyelesaikan kasus hukum relatif tidak ada, namun hanya kepada masyarakat sendiri yang menjadi klien di LPH YAPHI yang takut berhadapan dengan hukum, tidak terusterang terhadap kasus yang dihadapi, dan kurang paham terhadap hukum sehingga LPH YAPHI selalu mengadakan sosialisasi dan pendidikan hukum pada masyarakat. Pada LBH Mega Bintang kendala-kendalanya adalah dalam struktural organisasinya kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk penanganan perkara dan penyelesaian kasus hukum dalam perkara perdata sesuai dengan cara Pemberi Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum dapat melalui dua jalur alternatif, yaitu: Secara tidak langsung, pada LPH YAPHI klien dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum, kemudian dilayani oleh pemberi Bantuan Hukum dengan cara pendampingan administrasi yaitu dengan memberikan pemahaman tentang duduk persoalan dan solusi terhadap kasus hukum perdata yang dihadapi melalui konsultasi dan pendampingan di proses nonlitigasi dan dalam proses litigasi pemberi bantuan hukum dapat memberikan bantuan secara administrasi yaitu pembuatan surat-surat yang diperlukan dalam proses peradilan pada tingkat pertama.

Secara Langsung, pada Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang akan langsung ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Bantuan Hukum dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh LBH Mega Bintang yaitu menuliskan

permohonan bantuan hukum dan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara hukum perdata. Sikap mental para pejabat publik dalam bidang hukum dalam melayani kebutuhan masyarakat, termasuk advokat yang kurang peka akan kebutuhan masyarakat dalam melayani bantuan hukum. Kesadaran masyarakat mengenai wawasan hukum, dan sikap merasa acuh terhadap persoalan hukum sendiri, merasa enggan, bahkan takut untuk berhubungan dengan hukum dan bertemu dengan advokat atau dengan pemberi Bantuan Hukum. Kurang tahunya masyarakat akan adanya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Lembaga Bantuan Hukum, yang enggan karena tahunya adalah ke kantor advokat yang umumnya memakan biaya yang mahal. Kurang memadainya personil pemberi bantuan hukum dalam memberikan Bantuan Hukum dikarenakan memerlukan keikhlasan dalam melayani masyarakat yang kurang mampu. Kurangnya sosialisasi tentang adanya Program Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam programnya yaitu memberikan Bantuan Hukum

Saran

Sebaiknya dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum perdata pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin, kecil dan tertindas ataupun orang-orang yang termarginalkan lainnya LBH Mega Bintang dan LPH YAPHI memberikan bantuan hukum tetap memperlakukan sama dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, mengadakan pelatihan hukum, dan pembekalan dalam penanganan kasus hukum. Lebih aktif kembali dalam

memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik yang berupa pendidikan, seminar, penyuluhan hukum maupun sosialisasi tentang bantuan hukum dan masalah-masalah hukum yang berkenaan terhadap pemberian bantuan hukum. Mencari pendanaan baik dari pemerintah, maupun sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK.
- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Bantuan Hukum Kemnukumham RI.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: U.B Press.